

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan konsep dasar variabel yang diteliti dan penelitian terdahulu sebelum membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel serta hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan produksi barang dan jasa yang ada disuatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, penambahan produksi jasa, perkembangan infrastruktur, serta penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2006).

Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli, teori-teori ini muncul untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini lebih memfokuskan kepada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila kekurangan penduduk, produksi marjinal lebih tinggi dari pendapatan per kapita yang artinya penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Apabila penduduk sudah semakin banyak, hasil tambahan yang berkurang akan berpengaruh terhadap fungsi produksi, produksi marjinal akan mengalami penurunan.

b. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan kepada pentingnya peran pengusaha dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi, para pengusaha merupakan golongan yang menciptakan inovasi dalam kegiatan perekonomian secara terus-menerus. Inovasi tersebut seperti, mengeluarkan barang-barang baru, efektifitas dan efisiensi produksi, perluasan pasar, menggunakan sumber bahan mentah baru, dan perubahan dalam organisasi.

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang harus dicapai agar suatu perekonomian dapat mencapai *steady growth* atau pertumbuhan yang mantap dalam jangka panjang. Analisis ini menggunakan pemisalan sebagai berikut:

1. Barang modal mencapai kapasitas penuh
2. Tabungan proporsional dengan pendapatan nasional
3. Rasio modal produksi atau *capital-output ratio* memiliki nilai yang tetap
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor

2.1.1.1 Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Tanah dan kekayaan alam dapat mempermudah usaha pengembangan perekonomian negara terutama dalam masa-masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi. Luas dan kesuburan tanah, iklim dan cuaca, jenis dan jumlah hasil laut dan hutan yang didapat, serta jenis dan jumlah kekayaan barang tambang.

b. Kualitas dan Kuantitas Penduduk dan Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah penduduk dapat memperluas pasar dan produksi barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka peningkatan jumlah penduduk dapat memicu dorongan terhadap pertumbuhan produksi masyarakat dan tingkat kegiatan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk juga dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi apabila perekonomian suatu negara belum cukup maju tetapi sudah menghadapi masalah kelebihan penduduk.

c. Barang Modal dan Teknologi

Apabila pertumbuhan barang modal tidak diiringi dengan kemajuan teknologi, maka suatu negara tidak akan mengalami perkembangan. Karena tanpa adanya kemajuan teknologi, jumlah barang yang dihasilkan tidak akan meningkat dan pendapatan per kapita hanya mengalami peningkatan yang sangat rendah.

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat dapat menentukan sejauh apa pertumbuhan ekonomi terjadi. Adat istiadat tradisional dapat menghambat sistem produksi dan hasil produksi yang tinggi. Sedangkan sikap berhemat,

menghargai kerja keras, dan inovasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan perekonomian suatu negara pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menjadi lebih baik ataupun memburuk jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan acuan dalam menentukan kondisi perekonomian suatu negara dan kesejahteraan rakyatnya. Apabila persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat negara tersebut memiliki hidup yang sejahtera. Berikut merupakan indikator-indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan nasional atau penambahan output barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Nilai PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, PDB menunjukkan pendapatan nasional riil yang dihitung dari keseluruhan output dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Kenaikan nilai PDB atau pendapatan nasional riil dari periode sebelumnya merupakan syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi.

2. Pendapatan Riil Per Kapita

Pendapatan riil per kapita menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara yang dihitung berdasarkan harga konstan. Perekonomian dapat

dikatakan mengalami pertumbuhan yang positif apabila pendapatan keseluruhan masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.

3. Kesejahteraan Penduduk

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat menaikkan pendapatan masyarakat, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pendapatan mulai meningkat.

4. Lapangan Kerja dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran akibat dari meningkatnya jumlah barang produksi dan pasar penjualan yang semakin luas.

2.1.1.3. Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) diukur menggunakan satuan rupiah berdasarkan harga konstan, sementara ukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan persentase bukan satuan rupiah. Apabila persentase pertumbuhan ekonomi positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran. Pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan bahwa pendapatan nasional riil yang lebih kecil dari periode yang sebelumnya.

Dengan indikator PDB, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_t} \times 100\%$$

R = Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)

PDB_t = PDB (pendapatan nasional riil) pada tahun t

PDB_{t-1} = PDB (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya

2.1.2 Kebijakan Moneter

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter untuk mengendalikan besaran moneter dan suku bunga untuk meraih tujuan perekonomian yang diinginkan (Warjiyo, 2004). Kebijakan moneter merupakan bagian dan memiliki hubungan yang terkait oleh kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mencapai stabilitas inflasi dan melakukan fungsi intermediasi yang seimbang terhadap sistem keuangan. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil dan keuangan melalui berbagai transmisi kebijakan moneter yaitu suku bunga, kredit, uang, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan (Warjiyo, 2004).

Kebijakan moneter memiliki dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian, yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan

moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan cara penurunan jumlah uang beredar.

2.1.2.2 Teori Moneter

Definisi teori moneter dalam arti luas adalah teori tentang peranan uang dalam perekonomian, sedangkan dalam arti sempit yaitu pasar uang. Artinya, teori moneter adalah teori mengenai permintaan uang dan penawaran uang. Dapat dikatakan bahwa inti teori moneter adalah analisis mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang penawaran uang (Atmojo, 2018).

- a. Teori Klasik, teori ini sebenarnya adalah teori permintaan dan penawaran uang. Fokus dari teori ini yaitu hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan dua variabel diartikan melalui konsep teori mereka mengenai permintaan akan uang. Perubahan pada jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan uang yang selanjutnya menentukan nilai uang.
- b. Teori Keynesian, teori ini berpendangan bahwa fungsi uang selain sebagai alat tukar adalah uang digunakan sebagai alat tukar adalah juga menyimpan uang. Fungsi inilah yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Keberadaan antara permintaan dan penawaran uang. Harga uang dinyatakan sebagai “bunga”. Jika uang semakin langka maka tingkat bunga semakin mahal. Pada saat tingkat bunga semakin tinggi, maka permintaan investasi dan konsumsi akan berkurang. Sebaliknya, tingkat bunga semakin rendah akan menyebabkan permintaan kredit akan meningkat, akibatnya pertumbuhan ekonomi meningkat.

2.1.2.3 Instrument Kebijakan Moneter

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat saat ini dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Contohnya yaitu pada saat Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau dapat juga membeli atau menarik surat berharga yang beredar di pasar modal (Atmojo, 2018).

b. Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*)

Kebijakan Diskonto adalah suatu kebijakan yang mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank umum saat terjadi pengurangan dan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila bank sentral telah memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah mencapai atau melebihi kebutuhan, maka bank sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga dengan hal ini maka jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang, biasanya banyak orang yang berkeinginan untuk menabungkan uangnya di bank. (Kasmir, 2014)

c. Kebijakan Cadangan Kas

Kebijakan ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan *cash ratio*, dimana Bank sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau yang sering kita sebut dengan *cash ratio*. Bank umum akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun ada sebuah

pengecualian yakni adanya presentase tertentu dari uang yang disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.

d. Kebijakan Kredit Ketat

Kebijakan ini berhubungan dengan pengawasan, pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini yaitu mampu membaca situasi perekonomian dengan baik dan mencari sebuah solusi dari masalah yang ada. Kredit ini diberikan oleh bank umum dengan menimbang beberapa syarat seperti karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan kondisi perekonomian. Contohnya ketika peredaran uang di masyarakat tidak merata dan sering terjadi fluktuatif maka bank sentral akan menerapkan sistem pajak kredit ketat agar peredaran uang di masyarakat kembali merata.

e. Kebijakan Dorongan Moral (*Moral Suasion*)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara pengumuman, pidato dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya untuk menahan pinjaman tabungan dan melepaskan pinjaman yang ada. Untuk kebijakan yang ini layaknya seperti perintah dari atasan dan secara langsung akan ditindak lanjuti. Kebijakan ini memiliki kekurangan yakni tidak semua responden yang diperintahkan akan melakukan perintah tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada aksi yang signifikan dan kontrol yang minimal.

2.1.2.4 Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia sesuai dengan UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi perubahan nilai tukar yang berlebihan karena peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dari itu tujuan kebijakan moneter yaitu:

1. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan saat pertumbuhan ekonomi terjadi secara terkendali dan berkelanjutan, dimana pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2. Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja atau terbukanya lapangan kerja baru dapat dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, agar pengusaha dan wirausaha dapat dengan mudah mendapat pinjaman dan mampu mengembangkan usahanya, sehingga tercipta lapangan kerja baru. Kesempatan kerja juga akan meningkat apabila produksi meningkat, untuk meningkatkan produksi dapat

dilakukan dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja.

3. Kestabilan Harga

Harga yang stabil dapat membuat inflasi lebih terkendali sehingga kondisi makro ekonomi negara akan terjaga. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan naiknya harga dan kekurangan pasokan barang. Jika masyarakat menilai harga akan naik, maka akan terjadi pembelian secara besar-besaran yang dapat menyebabkan kelangkaan barang.

4. Keseimbangan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain (Nopirin, 1996). Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor atau kedua sisi debit dan kredit menunjukkan jumlah yang sama atau sama dengan nol.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya kebijakan moneter ini diharapkan keadaan ekonomi negara mengalami peningkatan pada kegiatan produksi, yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang maupun jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

2.1.2.5 Suku Bunga

a. Pengertian Suku Bunga

Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Dalam menabung atau investasi tingkat bunga merupakan salah satu indikator keputusan seseorang. Apabila tingkat bunga tinggi, maka dana yang ditawarkan akan lebih banyak. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan (Boediono, 1991). Apabila tingkat bunga rendah, masyarakat akan terdorong untuk berinvestasi dan konsumsi.

b. Teori Suku Bunga

1. Teori klasik, bunga merupakan harga yang terjadi dipasar dana investasi dalam suatu periode tertentu., teori klasik membahas tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan dan suku bunga sebagai suatu pengimbangan antara permintaan dan penawaran.
2. Teori Keynes, tingkat bunga ditentukan dari permintaan dan penawaran uang. Ada tiga motif orang dalam memegang uang, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hubungan antara tingkat bunga dengan unsur permintaan uang merupakan tujuan spekulasi, apabila tingkat bunga rendah maka permintaan uang akan besar dan sebaliknya. Apabila seseorang memiliki uang yang lebih, mereka akan dapat berspekulasi dengan cara membeli surat-surat berharga seperti saham atau obligasi dipasar modal.

Dengan kemungkinan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen ataupun memperoleh bunga.

3. Teori Modern, dikembangkan oleh John Hicks di dalam *Econometrica* (1937). John Hicks pertama kali menekankan tingkat bunga keseimbangan umum dalam perekonomian, bila memenuhi keseimbangan dipasar investasi dan keseimbangan dipasar uang. Tingkat bunga keseimbangan umum ini disebut dengan tingkat bunga murni (pure interest rate = R_M).

c. Tipe Suku Bunga

1. Real Interest Rate

Merupakan suku bunga murni yang mencantumkan inflasi sebagai faktor penentu penurunan daya beli, sehingga menampilkan return bersih yang akan didapat setelah dikurangi inflasi.

2. Nominal Interest Rate

Merupakan suku bunga yang tidak mencakup inflasi sebagai faktor penentu penurunan daya beli, biasanya tertera pada rekening koran dan memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan.

2.1.2.6 Uang Beredar

Pengertian uang beredar atau *money supply* dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian terbatas dan pengertian luas. Dalam pengertian terbatas, uang beredar (M1) adalah mata uang yang berada dalam peredaran dan ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan dan badan pemerintah. Dalam pengertian luas, uang beredar mencakup mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari tabungan, deposito berjangka, dan

rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar dalam pengertian luas dinamakan sebagai likuiditas perekonomian atau M2 (Sukirno, 2006).

2.1.3 Kebijakan Fiskal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berhubungan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal berasal dari bahasa latin yaitu *fiscus* yang merupakan nama seseorang yang memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno.

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat lalu digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran negara untuk memajukan perekonomian. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengendalikan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

2.1.3.1 Pengertian Kebijakan Fiskal Menurut Para Ahli

Menurut Sukirno (2006) kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam menciptakan perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan tujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Menurut John F. Due (1968) kebijakan fiskal memiliki nama lain kebijakan stabilitas dan pembangunan, meliputi penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam meraih kestabilan ekonomi dan laju pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Tim Visi Adiwidya (2015: 92) kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan dalam menstabilkan perekonomian negara melalui pendapatan dan pengeluaran negara.

Menurut Haryadi (2014: 82) kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dilakukan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mengarahkan perekonomian negara agar lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.3.2 Jenis Kebijakan Fiskal

Menurut Nopirin (2000) kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandang ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan suatu kebijakan fiskal untuk mengarahkan kondisi perekonomian dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penurunan pajak maupun peningkatan belanja pemerintah dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menurunkan angka pengangguran.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Peningkatan pajak dan pengurangan belanja pemerintah dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengontrol inflasi.

2.1.3.3 Instrumen Kebijakan Fiskal

Mankiw (2014: 118) berpendapat bahwa instrumen kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama, instrumen tersebut adalah kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah.

1. Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak merupakan pungutan wajib yang umumnya berupa uang. Pajak tersebut dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada pemerintah.

Menurut konsep teori Keynesian dalam Mankiw (2006: 279) adanya perubahan penerimaan pajak dapat mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Penurunan pajak sebesar ΔT secara langsung akan menaikkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) $Y - T$ sebesar ΔT , dengan demikian menaikkan konsumsi sebesar $MPC \times \Delta T$.

Menurut Sriwahyuni (2014) sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia berupa pajak. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Ekstentifikasi dan intensifikasi merupakan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur ialah pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah, tarif pajak akan semakin tinggi terhadap barang yang semakin mewah, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini bertujuan agar masyarakat tidak berlomba-lomba dalam membeli barang mewah.

Menurut Sukirno (2006), jenis pajak yang dipungut pemerintah secara garis besar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Jenis pungutan pajak yang dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak secara langsung. Wajib membayar pajak bagi setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang melaksanakan kegiatan dan memperoleh keuntungan.

b. Pajak tidak langsung

Jenis pungutan pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Pajak impor merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang sangat penting.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatur besarnya pengeluaran beserta penerimaan setiap tahunnya untuk mengatur jalannya perekonomian. Di negara maju pajak merupakan sumber yang utama dari pembelanjaan pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yaitu, membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian untuk membiayai kegiatan pembangunan (Sukirno, 2006).

Jumlah pengeluaran pemerintah pada suatu periode ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang paling penting diantaranya merupakan, jumlah pajak yang diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan.

a. Proyeksi jumlah pajak diterima

Pemerintah terlebih dahulu mengumpulkan data dan membuat proyeksi mengenai pajak yang akan diterima, lalu menyusun anggaran belanja pemerintah.

b. Tujuan ekonomi

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu mengatur kegiatan perekonomian ke arah yang diinginkan. Tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam memenuhi tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak.

c. Politik dan keamanan

Pertimbangan politik dan keamanan negara merupakan tujuan yang penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Perselisihan antara golongan masyarakat dapat menyebabkan kenaikan belanja pemerintah, begitu pula dengan ancaman keamanan dari negara luar dapat menimbulkan kenaikan yang sangat besar dalam pengeluaran ketentaraan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Judul/ Tahun | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber |
|-----|--|---|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Muara Nangarumba/Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur/Tahun 2016 | Pertumbuhan ekonomi dan suku bunga | Jumlah uang beredar, pajak, dan pengeluaran pemerintah | Tidak ditemukan pengaruh langsung dari tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pada penelitian ini tidak didapatkan pengaruh kausal total, dan hanya pengaruh tidak langsung saja. | Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 8 (2), 2016 ISSN 2086-1575 E-ISSN 2502-7115 |
| 2 | Frisyelia Renshy Tiwa/Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (Sbi) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014/2016 | SBI, Uang beredar dan Pertumbuhan ekonomi | Pajak dan pengeluaran pemerintah | Hasil penelitian menunjukkan variabel investasi, suku bunga dan jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi | Jurnal Berkala Ilmiah Efisien Unsrat Volume 16 No. 02 Tahun 2016 |
| 3 | Dwi Widiarsih/Efektivitas Fiskal - Moneter: Strategi Pemulihan Ekonomi Provinsi Riau Dalam Menghadapi Era New Normal/2021 | Pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar | Pajak dan suku bunga | Dalam periode penelitian variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam persamaan jangka panjang kedua dan ketiga. Sedangkan variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam | Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Vol. 11 No.1, 2021, hlm 67-81 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | | | persamaan jangka panjang kedua dan ketiga. | |
| 4 | Angandrowa Gulo/ Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia/2008 | Jumlah uang beredar, penerimaan pajak dan PDB Indonesia | Pengeluaran pemerintah dan suku bunga | Hasil estimasi menunjukkan bahwa aspek fiskal dan aspek moneter secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia | Jurnal UHN VISI (2008). 16 (3), 2008 |
| 5 | Sem Rantebua/Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia/2020 | Pengeluaran pemerintah, pajak, dan pertumbuhan ekonomi | Suku bunga dan jumlah uang beredar | Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik suatu kesimpulan bawa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. | Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 5, Nomor 1. Tahun 2020. |
| 6 | Anisa Dwi Aprilia/Analisis Pengaruh Fiskal Dan Moneter Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia/2016 | Pajak, suku bunga dan uang beredar | Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah | Penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, suku bunga dan jumlah uang yang beredar secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. | AGRIST A : Vol. 4 No. 3 September 2016 : Hal. 230 - 238 |
| 7 | Akhmad Solikin/Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis/2018 | Pengeluaran pemerintah | Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, uang beredar, dan pajak | Hasil tinjauan sistematis menunjukkan hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dengan perekonomian bersifat beragam (mixed). Terdapat hasil penelitian yang membuktikan Hukum Wagner dan Hipotesis Keynes, melaporkan keduanya (bidirectional), dan | Jurnal PKN STAN Info Artha Vol.2, No.1, (2018), Hal.65-89 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | | | bahkan tidak berhasil membuktikan keduanya. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh perbedaan negara, <i>time series</i> , metode empiris serta metode pengujian yang digunakan. | |
| 8 | Fira Elfrida/Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia/2015 | Pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan penerimaan pajak. | Uang beredar dan pengeluaran pemerintah | Pertumbuhan ekonomi jangka pendek sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan subsidi yang merupakan bagian dari komponen kebijakan fiskal, sedangkan jangka panjang dipengaruhi secara signifikan oleh BI Rate dan minimum giro yang merupakan instrumen kebijakan moneter. Dan dalam jangka pendek inflasi dipengaruhi secara signifikan oleh BI Rate, sedangkan dalam jangka panjang Indeks Persepsi Korupsi (IHK), kebijakan moneter dan fiskal tidak signifikan mempengaruhi inflasi. | Jurnal Trisakti Media Ekonomi Vol. 23 No. 2 Agustus 2015 |
| 9 | Elva Dona, Hasdi Aimon, Zul Azhar/Analisis Ekonomi Sektor Riil dan Sektor Moneter di Indonesia/2013 | Uang beredar | Suku bunga, pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi | Berdasar hasil estimasi perekonomian berpengaruh positif dan signifikan pada konsumsi rumah tangga. Begitu juga dengan lag konsumsi rumah tangga yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia, kontribusi perekonomian dan lag konsumsi rumah tangga sesuai dengan modelnya adalah dominan dan hanya 0.04% lainnya | Jurnal UNP Kajian Ekonomi, Januari 2011, Vol. I, No. 02 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | | dipengaruhi oleh faktor lainnya. | |
| 10 | Kanetasya Sabilla/Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia/2014 | Pajak dan pengeluaran pemerintah | Uang beredar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional, begitu juga dengan tenaga kerja. Perdagangan internasional tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. | Jurnal UMY Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, April 2014, hlm.12-22 |
| 11 | Heru Perlambang/ Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Sbi, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi/2012 | Jumlah uang beredar (M1) dan Suku bunga | Pajak, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi | Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda koefisien negatif pada nilai tukar dan jumlah uang beredar sedangkan SBI memiliki pengaruh signifikan positif. | Jurnal Trisakti, Media Ekonomi Vol. 19 No. 2, Agustus 2010. |
| 12 | Ridho Windi Atmojo/ Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia/2018 | Suku bunga | PDB, uang beredar, pajak, dan pengeluaran pemerintah | Berdasarkan perhitungan multiplier kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, maka yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional adalah kebijakan moneter, dimana multiplier kebijakan moneter lebih besar daripada multiplier kebijakan fiskal. Penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan beberapa variabel dan fokus tujuan. | Jurnal Unnes, Economics Development Analysis Journal 7 (2) (2018) |
| 13 | Farah Fauziah/ Kebijakan Moneter Dalam | Jumlah uang beredar | Suku bunga, pajak, pengeluaran pemerintah, | Dalam uji variance decomposition dalam mekanisme transmisi moneter konvensional | Jurnal UIN Jakarta, Signifika |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | Mengatasi Inflasi di Indonesia/2015 | | dan pertumbuhan ekonomi | model I terhadap inflasi, variabel yang diajukan pada model I penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel konvensional meliputi SBI (18.67%), M2 (12.07%), obligasi (13.12%) yang memberikan sumbangan negatif (menaikan) inflasi sebesar 43.86%. | n Vol. 4 No. 1 April 2015 |
| 14 | Arius Jonaidi/ Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia/2012 | Pertumbuhan Ekonomi | Uang beredar, suku bunga, pajak dan pengeluaran pemerintah | Hasil penelitian dari variabel pengangguran, investasi, dan kemiskinan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat keyakinan 95 persen. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-statistik sebesar 6.5298 dan F-tabel = 2,68 (α ; k-1, n-k) = (0,05; 3; 162) sehingga F-hitung > F-tabel. | Jurnal UNP, Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1, Nomor 1, April 2012. |
| 15 | Mutia Sari/ Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia/2016 | Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi | Pajak, uang beredar, dan suku bunga | Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diperoleh F hitung sebesar 18.187 lebih besar dari F tabel 4.2051 pada tingkat confident interval 95 %. | Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 3(2), 109-115. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam kerangka pemikiran akan dijelaskan bagaimana peneliti mengolah data yang ada sehingga

dapat menghasilkan hasil analisis. Adapun kerangka berpikir penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Hubungan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan dengan hipotesa Keynes bahwa, penawaran uang (Money Supply) memiliki pengaruh yang positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Kondisi ini memicu masyarakat untuk melakukan investasi sehingga menciptakan kenaikan output dan memicu pertumbuhan ekonomi.

b. Suku Bunga

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter, suku bunga digunakan untuk mencapai tujuan utama kebijakan moneter yaitu stabilitas perekonomian Indonesia. Suku bunga memiliki hubungan yang vital dengan investasi dan dapat menentukan kestabilan suatu negara. Saat suku bunga tinggi investasi akan menurun karena mempengaruhi permintaan publik barang dan jasa. Sedangkan saat suku bunga rendah, investasi akan meningkat karena penurunan biaya pinjaman dan potensi peningkatan harga aset investasi terutama saham. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif apabila perekonomian Indonesia sedang

mengalami ketidakstabilan melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.

2.3.2 Hubungan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

a. Pajak

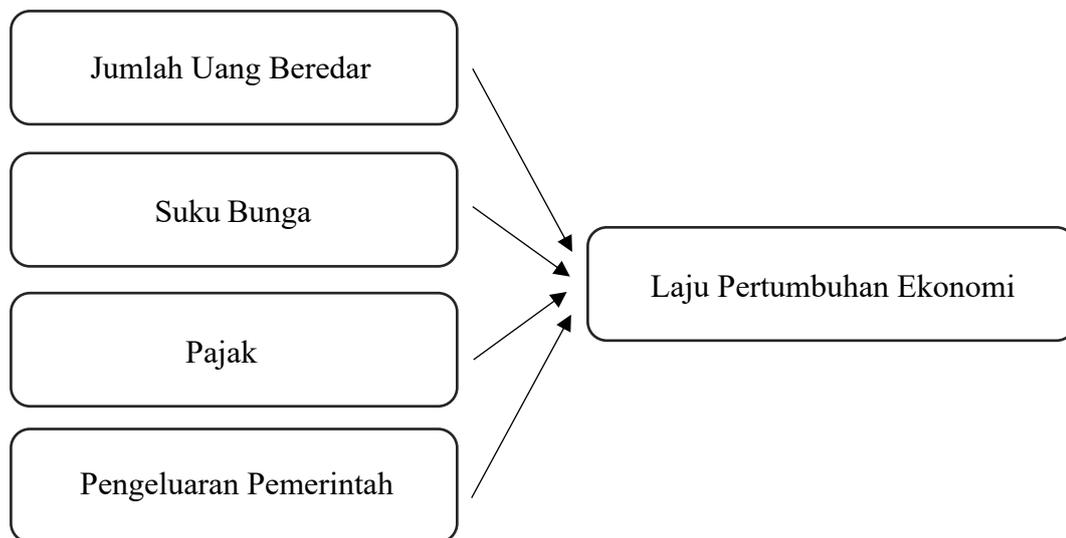
Pemungutan pajak selain menjadi sumber pembiayaan negara pajak juga dapat berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilisasi perekonomian, melindungi produksi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Perubahan tarif dalam pajak akan berpengaruh terhadap perekonomian. Apabila tarif pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri dapat meningkatkan hasil produksinya. Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan tarif pajak maka akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan hasil produksi industri secara umum.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan pemerintah dan dipengaruhi dari besarnya penerimaan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu keputusan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa tersebut merupakan pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dapat meningkat melalui tingginya pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui adanya efek multiplier dari pengeluaran pemerintah. Titik keseimbangan pendapatan nasional akan tergeser pada tingkatan yang lebih

tinggi apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat melalui besarnya pengeluaran pemerintah.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga variabel Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh positif, sedangkan Suku Bunga dan Pajak berpengaruh negatif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
2. Diduga variabel Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.